

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Penerapan otonomi daerah yang luas saat ini bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi ekonomi yang ada sehingga dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara berdaya guna dan berhasil guna untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Wardhiah, 2018).

Pertumbuhan ekonomi seyogyanya dapat memperlihatkan trend yang meningkat dan mantap dari tahun ke tahun, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan guna mempercepat perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian yang berimbang dinamis. Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu pembangunan di bidang-bidang lainnya sekaligus sebagai kekuatan utama pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan sosial ekonomi (Novandy dkk, 2015).

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari adanya pembangunan ekonomi disuatu daerah oleh karena itu pemerintah selalu mengupayakan agar pertumbuhan ekonomi selalu meningkat dari tahun ke tahun yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Hal ini berarti, bahwa dalam jangka panjang, kesejahteraan tercermin pada peningkatan output perkapita yang sekaligus memberikan banyak alternatif pada masyarakat (Fajri, 2016).

Fenomena yang terjadi di wilayah Se-Eks Karesidenan Pati yaitu Pertama, kasus yang sering terjadi di Kudus pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Kudus gagal merealisasikan pendapatan asli daerah yang meleset hal ini disebabkan total target pendapatan asli daerah sebesar Rp 273,804 miliar, di akhir tahun anggarannya mencapai Rp 366,031 miliar atau setara dengan 97.92 persen. Dalam penjelasannya, Bupati Kudus Musthofa memaparkan bahwa pendapatan asli daerah pada Kabupaten Kudus disumbang dari pajak daerah,

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah (wawasan.com).

Kedua, kasus yang terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2018 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih dibayangi rendahnya belanja modal sementara belanja pegawai sangat tinggi, sehingga proyek pembangunan di Kabupaten Rembang menjadi lamban. Hal ini disampaikan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz (suaramerdeka.com).

Ketiga, kasus yang sering terjadi di Kabupaten Jepara pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat paripurna penyampaian RAPBD. Dalam hal tersebut, banyak masukan yang diberikan pada Pemkab Jepara terkait RAPBD yang telah disusun. Dalam RAPBD 2018 yang disampaikan Wakil Bupati Jepara tercatat bahwa belanja langsung Rp 942,853 miliar, hal ini berarti bahwa penyusunan dalam RAPBD tidak boleh melenceng (radarkudus.jawapos.com).

Keempat, kasus yang terjadi di Kabupaten Blora yang disampaikan oleh Bupati Blora Djoko Nurgroho mengenai anggaran belanja Kabupaten Blora pada tahun 2018 diproyeksikan menurun dibanding 2017. Adapun belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp 2,051 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp 33 miliar. Namun defisit tersebut ditutup dengan anggaran pembiayaan sebesar Rp 33 miliar. Dengan kata lain sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun depan diproyeksikan nihil (banyuurip.com).

Kelima, kasus yang terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2018 dengan menjadikan penduduk dan keluarga titik sentral pembangunan. Peningkatan peran

serta masyarakat dinilai sangat penting dalam mengenai permasalahan kependudukan di Kabupaten Blora Jawa Tengah, hal ini untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, dengan adanya kegiatan-kegiatan yang terpusat menjadi satu ini bisa memperkuat kemitraan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan penduduk dan keluarga titik pusat sentral pembangunan (blorakab.go.id).

Keenam, kasus yang terjadi di Kabupaten Pati bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang sangat tajam pada tahun 2017. Angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten pati mencapai 5,98 persen, sehingga patut diapresiasi. Salah satu yang membuat pertumbuhan ekonomi di Pati berkembang pesat adalah peluang investasi yang baik (murianews.com).

Pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan karena tanpa pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi peningkatan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas, dan distribusi pendapatan. Karena pertumbuhan ekonomi sangat penting untuk mempersiapkan perekonomian menjalani tahapan kemajuan suatu negara. Suatu negara tidak dapat menentukan batas waktu usia kematangan perekonomiannya sendiri. Pertumbuhan ekonomi merupakan rumah tangga untuk mencapai tahapan kemajuan ekonomi selanjutnya. Sebab, seluruh perekonomian yang mampu terus menerus tumbuh dalam jangka panjang umumnya telah memiliki kemampuan untuk menjadi modern. Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yang dibutuhkan bukan apa tenaga kerja, bahan baku dan teknologi, melainkan juga kelembagaan-kelembagaan ekonomi dan sosial modern (Nurrahmah, 2014).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertama, dipengaruhi pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Adapun jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan dan pajak lainnya. Retribusi daerah merupakan pendapatan yang berasal dari pungutan yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah menurut Wardhiah(2018) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmah(2014) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dituntut untuk dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat membiayai pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

Kedua, dipengaruhi oleh belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dipergunakan untuk antara lain belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan

bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan serta belanja modal lainnya. Belanja modal menurut Fajri(2016) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, dipengaruhi oleh belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan dua urusan pilihan. Menurut Rubdiono (2015) belanja langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penggunaan belanja langsung secara tepat pada suatu daerah sesuai tujuan yang diinginkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut pula. Seperti diketahui belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Keempat, dipengaruhi oleh sisa lebih perhitungan anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode akuntansi. Penelitian yang dilakukan oleh Novandy (2015) sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan sisa lebih perhitungan anggaran yang akan meningkat dari tahun ke tahun maka pemerintah daerah akan termotivasi untuk melakukan investasi.

Kelima, dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jumlah penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Penelitian yang dilakukan oleh Arianto (2015)

menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurrahmah (2014) menyatakan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang paling dominan menggerakkan pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja. Tenaga kerja dalam pembangunan nasional merupakan dinamika penting yang menentukan laju pertumbuhan ekonomi baik dalam kedudukannya sebagai tenaga kerja produktif maupun sebagai konsumen.

Belanja langsung dan sisa lebih perhitungan anggaran ditambahkan karena belanja langsung dan sisa lebih perhitungan anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan daerah itu sendiri sehingga ikut membantu tercapainya pertumbuhan ekonomi yang baik (Novandy dkk, 2015). Selain itu variabel penelitian jumlah penduduk ditambahkan karena jika terjadi perubahan jumlah penduduk maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Arianto, 2015).

Perbedaan lainnya terletak pada sampel penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Wardhiah (2018) objek dalam penelitian ini adalah di Provinsi Aceh, sedangkan dalam penelitian ini mengambil objek di Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, BELANJA LANGSUNG, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PERTUMBUHAN**

EKONOMI (STUDI EMPIRIS PADA PEMERITAHAN KABUPATEN SE-EKS KARESIDENAN PATI TAHUN 2012-2018).

1.2 Ruang Lingkup

Batasan masalah dalam penelitian ini hanya terdapat Pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati. Sampel dalam penelitian ini hanya di wilayah Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang serta Kabupaten Blora. Tahun yang digunakan 2012 – 2018.

1.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati ?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati ?
3. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati ?
4. Apakah sisa lebih perhitungan anggaran berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati ?
5. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan analisa secara empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.

2. Untuk menguji dan analisa secara empiris pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.
3. Untuk menguji dan analisa secara empiris pengaruh belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.
4. Untuk menguji dan analisa secara empiris pengaruh sisa lebih perhitungan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.
5. Untuk menguji dan analisa secara empiris pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Se-Eks Karesidenan Pati.

1.5 Kegunaan penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Belanja Langsung, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Se-Eks Karesidenan Pati tahun 2012-2018.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran agar daerahnya dapat semakin maju dan berkembang.

3. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.